

PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMEDIASI PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAKIP DI KABUPATEN MERAUKE

Caecilia Dewi Anggraeni Dumatubun¹, Anita Erari², Sarwo Edy Handoyo³

^{1,2,3}Universitas Terbuka UPBJJ, Jayapura, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: fnap@live.com, heridadi247@gmail.com, suhadicendana@gmail.com

Article History

Received: August

Revised: August

Published: September

Key Words:

Good Governance, Apparatus Competence, Internal Control System, LAKIP Quality, Merauke Regency.

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the role of Good Governance in mediating the influence of apparatus competence and the government's internal control system on the quality of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) in Merauke Regency. Good Governance, which includes the principles of transparency, accountability, and participation, is considered an important factor in improving the effectiveness and quality of government performance reporting. This study uses a quantitative approach with a survey method, collecting data through questionnaires distributed to relevant officials in the Merauke Regency government. Data analysis was carried out using multiple regression techniques and path analysis to evaluate the relationship between apparatus competence, internal control system, Good Governance, and LAKIP quality. The research uses a quantitative research approach. The sample of this study is 38 OPDs with a total of 90 people consisting of Esalon III and IV officials from each OPD/Section. The results of the questionnaire were tabulated and analyzed by Structural Equation Modelling (SEM) using the SmartPLS application. The results of the analysis prove Good Governance, Apparatus Competence, Internal Control System, LAKIP Quality in Merauke Regency. Apparatus competencies have a positive and significant influence on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Apparatus competencies have a positive and significant effect on Good Governance in Merauke Regency, The Internal Control System has a positive and significant influence on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance has a positive and significant effect on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance mediates the internal control system has a positive and significant effect on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance mediates the competence of apartments in a positive and significant manner on the quality of LAKIP in Merauke Regency, Good Governance mediates the internal control system in a non-positive and insignificant manner to the quality of LAKIP in Merauke Regency.*

Kata Kunci:

Good Governance, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas LAKIP, Kabupaten Merauke.

Abstrack: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Good Governance dalam memediasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Merauke. Good Governance, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dianggap sebagai faktor penting dalam memperbaiki efektivitas dan kualitas pelaporan kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi berganda dan analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, Good Governance, dan kualitas LAKIP. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 38 OPD dengan jumlah 90 orang terdiri dari pejabat Esalon III dan IV dari setiap OPD/Bagian. Hasil kuesioner ditabulasi dan dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil analisis membuktikan Good Governance, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance di Kabupaten Merauke, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi



system pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi kompetensi aparatur secara positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke, Good Governance memediasi system pengendalian internal secara tidak positif dan tidak signifikan terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke.

Pendahuluan

Konflik dalam sektor publik, terutama pelayanan, sering kali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Di Kabupaten Merauke, pemerintah daerah menghadapi tantangan terkait akuntabilitas dan transparansi, yang kerap dipengaruhi oleh praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, penerapan good governance diperlukan, terutama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Good governance memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur melalui transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Kompetensi aparatur diukur dari keterampilan, kepemimpinan, serta kemampuannya dalam menerapkan kebijakan secara efisien. Di Kabupaten Merauke, penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan penyusunan LAKIP bertujuan memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencegah praktik penyelewengan serta memperkuat kepercayaan publik.

LAKIP menjadi alat evaluasi tahunan yang penting dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan program dan mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas laporan ini didukung oleh peraturan pemerintah yang menuntut akuntabilitas dari seluruh instansi, termasuk di tingkat daerah. Implementasi good governance tidak hanya memperbaiki pelayanan publik tetapi juga berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berdaya guna

Penilaian Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Merauke tahun 2023 didasarkan pada perbandingan target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan. Dari tiga sasaran strategis, masing-masing dengan satu indikator kinerja, seluruhnya mencapai hasil sangat tinggi, dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasi target kebijakan serta inventarisasi aset mendekati sempurna.

Good governance menjadi fondasi utama dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas mendorong integritas laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP). Kualitas LAKIP dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal yang efektif, yang keduanya memastikan proses penyusunan laporan berjalan sesuai standar. Pengendalian internal diatur melalui PP No. 60 Tahun 2008, di mana Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) bertugas mendukung tercapainya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur juga berperan penting dalam menyusun LAKIP yang akurat dan relevan. Good governance tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga kerangka kerja konkret untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kualitas laporan kinerja.

Penelitian ini memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan berbagai studi terdahulu. Terdapat 11 variabel yang memengaruhi kualitas LAKIP, di antaranya Kompetensi, SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), SAP, Good Governance, Teknologi Informasi, dan

lainnya. Berdasarkan survei awal di Kabupaten Merauke terhadap 25 aparatur, variabel yang paling dominan adalah Kompetensi, SPIP, dan Good Governance.

Kompetensi aparatur, sesuai penelitian seperti Erliyanti et al. (2022) dan Fauzi (2022), berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang juga menjadi faktor penting dalam penyusunan LAKIP berkualitas (Hutagalung, 2018; Usman, 2017). Kompetensi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. SPIP berperan penting dalam mengendalikan proses pengelolaan keuangan daerah dan mendukung terciptanya LAKIP berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang baik berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Syachnanda, 2019; Wulan et al., 2022).

Good Governance memainkan peran mediasi penting antara kompetensi dan SPIP terhadap kualitas LAKIP (Hidayat & Setiawan, 2023). Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara Kompetensi, SPIP, dan Good Governance dalam mempengaruhi kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek penting terkait pengaruh kompetensi aparatur dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Merauke. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kompetensi aparatur mempengaruhi kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji pengaruh kompetensi aparatur terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh SPI terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Hal ini akan membantu memahami sejauh mana sistem pengendalian internal yang diterapkan dapat memengaruhi kualitas laporan kinerja yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengaruh SPI terhadap penerapan good governance di Pemerintah Kabupaten Merauke. Mengingat pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan, penelitian ini akan menguji peran good governance sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kualitas LAKIP. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran good governance dalam memediasi hubungan antara kompetensi aparatur dan SPI dengan kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana good governance mempengaruhi atau memediasi hubungan kedua variabel tersebut dengan kualitas laporan kinerja pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka-angka. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada hasil pengukuran objektif dan menggunakan analisis statistik untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat generalisasi yang dapat menjelaskan berbagai peristiwa

yang dialami oleh populasi. Dalam konteks pengumpulan data kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.

Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan beragam variabel penelitian, seperti reward, punishment, kepuasan, etos kerja, dan komitmen organisasi. Melalui kuesioner ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka berdasarkan skala tertentu yang telah ditentukan, yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang relevan (Aswan, 2022). Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara sistematis variabel-variabel yang ada dan memperoleh data yang terukur secara jelas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan yang valid.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas LAKIP

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LAKIP. Hal ini berarti bahwa Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dalam hal administrasi dan akuntabilitas kinerja akan lebih mampu menyusun LAKIP dengan cara yang benar di setiap 38 OPD pada kabupaten Merauke, serta mampu mengumpulkan dan memproses data dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP adalah akurat dan dapat dipercaya, ini merupakan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntabilitas, format laporan, dan teknik evaluasi kinerja. Kompetensi Aparatur dalam analisis data dan informasi memungkinkan aparatur untuk mengevaluasi kinerja instansi dengan lebih mendalam, hal ini biasa dilakukan dalam penyusunan LAKIP selama satu tahun berjalan yang dilakukan oleh eselon III & IV dari setiap OPD dalam memahami akan pencapaian target penyusunan anggaran sampai realisasi dalam program kegiatan yang berlangsung di setiap OPD pada Kabupaten Merauke, apakah target yang hendak dicapai sesuai dengan RENJA yang dibuat tahun sebelumnya atau tidak. Kompetensi Aparatur dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu perbaikan dan menyajikannya dengan jelas dalam LAKIP. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif dan signifikan kompetensi Aparatur terhadap Kualitas LAKIP menurut Erliyanti et al., (2022), Wafa et al., (2020), Fauzi, (2022), Hartikayanti, (2020), Ardiyanti & Supriadi, (2018).

Good Governance memediasi hubungan kompetensi aparatur terhadap Kualitas LAKIP.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran Good Governance sangat mempengaruhi kompetensi Aparatur secara positif dan signifikan terhadap Kualitas LAKIP. Good Governance berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan kompetensi aparatur dengan kualitas LAKIP melalui pengaturan yang efektif, peningkatan kapasitas, dan pengawasan yang ketat. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik memastikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah mampu menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang baik di Kabupaten Merauke, Good Governance mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur, yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan program-program pemerintah di setiap lini di Kabupaten Merauke. Dengan kompetensi yang lebih baik, kualitas LAKIP yang dihasilkan juga akan meningkat dan berdayaguna demi peningkatan Laporan akuntabilitas kinerja setiap OPD. Prinsip-prinsip

Good Governance seperti transparansi dan akuntabilitas mendorong instansi pemerintah untuk menyajikan laporan yang jujur dan terbuka. Aparatur yang kompeten dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP akurat dan relevan sesuai . Good Governance menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk pelaporan akuntabilitas kinerja setiap OPD. Kompetensi aparatur dalam memahami dan menerapkan standar ini akan mempengaruhi kualitas LAKIP. Dengan adanya pedoman yang jelas, pegawai dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan ekspektasi dan regulasi yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan. Good Governance melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memastikan bahwa laporan kinerja dinilai secara objektif dan terukur. Aparatur yang kompeten dapat lebih efektif dalam menghadapi proses evaluasi ini dan memperbaiki laporan berdasarkan umpan balik yang diterima seperti yang telah dilakukan di OPD pada Kabupaten Merauke. Prinsip-prinsip Good Governance mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan dan pelaporan. Kompetensi aparatur dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik akan mempengaruhi bagaimana informasi dalam LAKIP dipahami dan diterima oleh masyarakat. Menurut Caroline G. Hernandez, yang menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang berwenang adalah elemen kunci dari good governance.”

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LAKIP

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LAKIP dilihat dari beberapa faktor Sistem Pengendalian Internal membantu memastikan bahwa pelaporan kinerja mengikuti peraturan dan standar yang berlaku sesuai dengan kebijakan internal, peraturan pemerintah, dan standar akuntansi. Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas LAKIP dan menghindari potensi permasalahan hukum/ administrative. System pengendalian internal yang efektif membantu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam LAKIP akurat dan dapat dipercaya, system pengendalian internal yang baik membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan instansi. Pada dasarnya kontrol yang memadai dan berkesinambungan disetiap instansi pemerintahan dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah yang dapat berdampak negatif pada kinerja serta pelaporan. System pengendalian internal secara efektif mencakup mekanisme serta evaluasi dan perbaikan demi pencapaian target dari setiap OPD. Umpan balik dari hasil audit dan evaluasi system pengendalian internal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas LAKIP dari waktu ke waktu. Ini terbukti bahwa pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai pengelola keuangan daerah dengan predikat WTP selama 9 kali dengan meliputi kepatuhan perundang-undangan, kinerja keuangan, pengelolaan asset daerah, kapatuhan terhadap pengadaan barang/jasa, kualitas laporan keuangan, evaluasi program kerja, yang menandakan bahwa system pengendalian internal di lini setiap OPD sampai kabupaten memenuhi standar yang sesuai. Sistem pengendalian internal menyediakan struktur pengawasan dan evaluasi yang diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD pada Kabupaten Merauke.

Good Governance memediasi hubungan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LAKIP

Good Governance membantu memastikan bahwa system pengendalian internal diterapkan dengan cara yang lebih efektif dan konsisten. Prinsip-prinsip yang berlaku seperti transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, pengendalian resiko, kepatuhan,

peningkatan kualitas laporan dalam Good Governance mendorong pengelolaan SPI yang lebih baik. Misalnya, transparansi dalam proses pengendalian internal memungkinkan identifikasi masalah lebih awal, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kesalahan dalam system pengendalian internal dapat ditindaklanjuti dengan serius. Dengan adanya prinsip Good Governance, proses penyusunan dan pelaporan LAKIP menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahunnya, Good Governance mendukung praktik pelaporan yang jujur dan akurat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas LAKIP. Melalui akuntabilitas, laporan yang dihasilkan menjadi lebih dapat diandalkan, sedangkan partisipasi dan transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif.

Good Governance mendorong kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku. SPI berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diikuti dalam praktik, sedangkan Good Governance menguatkan budaya kepatuhan ini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan standar etika yang tinggi. Kepatuhan ini sangat penting untuk menghasilkan LAKIP yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Good Governance mendorong proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks SPI, prinsip ini memfasilitasi penilaian reguler terhadap efektivitas kontrol dan mekanisme yang ada, serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala ini juga berdampak positif pada kualitas LAKIP, karena memungkinkan instansi untuk terus memperbaiki cara mereka melaporkan dan mengevaluasi kinerja mereka. Good Governance memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dengan memastikan bahwa laporan yang diberikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Kepercayaan ini penting agar kualitas LAKIP diterima dan dihargai oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif, didukung oleh prinsip-prinsip Good Governance, meningkatkan kredibilitas laporan kinerja dan membantu membangun kepercayaan setiap . Secara keseluruhan, Good Governance berperan sebagai jembatan yang menghubungkan system pengendalian internal pada Kualitas LAKIP di kabupaten Merauke dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kontrol internal yang baik dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel dibutuhkan.

Pengaruh Good Governance terhadap kualitas LAKIP

Good Governance mendorong transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan. Dengan prinsip transparansi, informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. LAKIP yang baik mencerminkan akuntabilitas instansi pemerintah khususnya di Kabupaten Merauke. Pada dasarnya tata kelola Pemerintahan yang baik diterapkan, laporan tersebut akan lebih akurat dan jujur, memaparkan pencapaian dan kendala dengan jelas. Good Governance menekankan pentingnya perencanaan strategis yang baik. Instansi pemerintah yang menerapkan prinsip ini akan memiliki rencana kerja yang jelas dan terukur. Kualitas LAKIP meningkat ketika ada perencanaan yang terstruktur dengan baik. LAKIP akan lebih efektif dalam menyampaikan pencapaian hasil sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Good Governance juga berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Instansi pemerintah yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. LAKIP akan mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien dan hasil yang optimal, serta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Good Governance melibatkan sistem pengawasan dan

evaluasi yang kuat. Pengawasan yang baik membantu memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. LAKIP akan lebih berkualitas jika melibatkan umpan balik dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang kinerja instansi. Good Governance menekankan integritas dan etika dalam administrasi publik. Instansi yang mematuhi prinsip-prinsip ini akan menghasilkan laporan yang lebih kredibel dan bebas dari penyimpangan. Kualitas LAKIP mencerminkan sejauh mana laporan tersebut bebas dari kepentingan pribadi/manipulasi data, serta seberapa jujur dan akurat laporan tersebut serta transparansi dalam menggambarkan kinerja di setiap OPD pada kabupaten Merauke . Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) , instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas LAKIP yang memiliki korelasi sangat baik. Kualita LAKIP tidak hanya mencerminkan kinerja instansi tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan yang diukur dari pengelolaan anggaran sampai tata laksana pemerintahan yang baik di Kabupaten Merauke.

Pengaruh tidak langsung kompetensi aparatur terhadap kualitas LAKIP yang dimediasi oleh good governance

Hal pengukuran melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh pegawai pemerintah yang mempengaruhi kinerja mereka. Kompetensi yang tinggi biasanya berhubungan dengan kualitas pekerjaan yang baik. Dalam proses evaluasi bagaimana tingkat kompetensi aparatur mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance, hal ini mengacu pada Kompetensi yang tinggi biasanya mendukung penerapan prinsip-prinsip governance yang lebih baik. Prinsip-prinsip good governance yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kualitas LAKIP. Kebijakan yang berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan kompetensi aparatur, memperbaiki praktik good governance, dan akhirnya meningkatkan kualitas LAKIP. Kompetensi aparatur yang dilakukan secara baik mungkin tidak langsung meningkatkan kualitas LAKIP tetapi melalui peningkatan good governance. Lakukan penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi model mediasi ini dalam konteks spesifik di OPD atau kabupaten Merauke, maka dapat disimpulkan bahwa good governance memediasi hubungan kompetensi aparatur terhadap kualitas LAKIP.

Pengaruh tidak langsung sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP yang dimediasi oleh good governance.

Good governance mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang tinggi. Prinsip-prinsip ini mendukung penerapan SPI dengan lebih efektif, karena pengelolaan yang baik akan mendorong pelaksanaan pengendalian internal yang lebih ketat dan berfokus pada kualitas SPI yang efektif memerlukan lingkungan governance yang baik untuk bisa berfungsi secara optimal. Good governance menyediakan kerangka kerja yang mendukung implementasi SPI dengan lebih efektif, seperti pengawasan yang lebih baik dan pelaporan yang lebih transparan.

Kualitas LAKIP meningkat ketika SPI diterapkan dalam konteks good governance yang solid. Good governance memastikan bahwa pengendalian internal diterapkan dengan cara yang benar dan konsisten, yang pada gilirannya memperbaiki akurasi dan keterandalan laporan kinerja. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP lebih signifikan ketika didukung oleh praktik good governance. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas LAKIP, penting untuk memperkuat good governance sebagai mediator, yang akan memastikan bahwa

system pengendalian internal diterapkan dengan lebih efektif. Sehingga hipotesis keenam (H7) good governance memediasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP tidak diterima.

Implikasi Penelitian

a. Implikasi Penelitian Teoritis

Pengembangan teori Good Governance yaitu penelitian ini dengan jelas memperluas pemahaman bagaimana peran Good Governance berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LAKIP di Kabupaten Merauke. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor bagaimana Good Governance berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan khususnya pada Kabupaten Merauke.

Pengembangan dalam penelitian akuntabilitas bagaimana menginspirasi tentang model-model mediasi baru dalam kajian akuntabilitas pemerintahan, khususnya bagaimana Good Governance dapat mempengaruhi efektifitas sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur dalam menghasilkan LAKIP yang berkualitas khususnya di kabupaten Merauke. Hal ini bisa melalui OPD / lini terkecil misalkan pada Bagian SETDA dan OPD sekitarnya yang mampu menyusun rencana sampai pencapaian realisasi sesuai dengan target kegiatan yang disusun, melalui realisasi triwulan demi pengukuran tingkat kinerja dari setiap OPD dalam hal penyerapan anggaran dan juga pemanfaatan anggaran yang berlaku sesuai dengan kebutuhan setiap OPD di Kabupaten Merauke.

b. Implikasi Penelitian Manajerial

Implikasi yang mengarah pada rekomendasi untuk meningkatkan praktik good governance di kabupaten Merauke termasuk perbaikan dalam pelatihan sumber daya manusia aparatur pemerintahannya, peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan standar good governance yang lebih ketat. Strategi dalam mengintegrasikan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dengan prinsip-prinsip good governance pengembangan indikator yang relevan dan mekanisme evaluasi yang lebih baik sangat diperlukan pada zaman ini. Akuntabilitas dalam kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah OPD dalam penyempurnaan setiap visi dan misi di setiap OPD. OPD yang keterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas seperti BPKAD yang mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi pengelola keuangan dan aset daerah melalui hasil laporan pemeriksaan oleh BPK, hasil dari pemeriksaan tersebut Kabupaten Merauke memperoleh predikat WTP selama 9 kali berturut-turut. Hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten dalam penerapan laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Merauke. Inspektorat juga berperan penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten Merauke. Setiap OPD di kabupaten wajib melaporkan Realisasi triwulan selamat 1 tahun dan LAKIP setiap tahun melalui Inspektorat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Inspektur yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dalam hal administrasi dan akuntabilitas kinerja lebih mampu menyusun LAKIP dengan benar, serta mampu mengumpulkan dan memproses data secara akurat dan terpercaya. Kompetensi ini

menjadi faktor penting dalam memastikan informasi yang disajikan dalam LAKIP sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan sangat menentukan kualitas laporan yang dihasilkan, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kompetensi aparatur dan kualitas LAKIP. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mendorong instansi pemerintah untuk menyajikan laporan yang jujur, terbuka, dan berkualitas. Good Governance menyediakan standar dan prosedur yang jelas dalam penyusunan LAKIP, memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan harapan publik dan memenuhi standar akuntabilitas. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip ini, aparatur pemerintahan didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya dan bekerja dengan standar yang lebih tinggi, yang berujung pada peningkatan kualitas laporan yang lebih detail, objektif, dan terstruktur.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas LAKIP. SPI membantu memastikan bahwa pelaporan kinerja mengikuti peraturan dan standar yang berlaku, menjaga integritas dan keandalan laporan. Dengan adanya kontrol internal yang efektif, risiko kesalahan atau penyimpangan dalam penyusunan LAKIP dapat diminimalkan. SPI yang baik memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyusunan laporan dilakukan dengan akurat dan transparan. Namun, tanpa dukungan Good Governance, SPI mungkin tidak berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas laporan. Oleh karena itu, Good Governance berperan sebagai mediator yang signifikan, memperkuat pengaruh positif SPI terhadap kualitas LAKIP dengan menjamin akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.

Good Governance tidak hanya berfungsi sebagai pilar yang memperkuat SPI, tetapi juga memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas LAKIP secara langsung. Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, instansi pemerintah dapat menyusun laporan yang lebih akurat dan relevan. Proses penyusunan LAKIP yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam konteks Kabupaten Merauke, di mana penerapan Good Governance diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas laporan akuntabilitas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, penerapan Good Governance dalam sistem pemerintahan, didukung oleh kompetensi aparatur dan SPI yang efektif, dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas LAKIP secara keseluruhan. Melalui mekanisme pengawasan, akuntabilitas yang jelas, serta partisipasi stakeholder, kualitas laporan kinerja instansi pemerintah dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah terus berjalan pada jalur yang benar, memberikan layanan publik yang maksimal, serta mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kerjanya.

Referensi

- Abdullah Karim, Abdul Hakim, Andy Fefta Wijaya dan Aji Ratna Kusumah (2014). Performance Accountability of Government Institution (Study in Education Agency in East Kalimantan Province). *Public Policy and Administration Research* Vol.4, No.6, 2014.
- Afli Hidayattulloh dan Irine Herdjiono (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call for Papers.
- Andi Permana Putra, Akram dan Hermanto (2017). Effect of performance-based budgeting, internal control and reporting on performance accountability government of West Lombok International Conference and Call for Papers, Jember, 2017.
- Annisa Oktavia, Edwin Bustami, Megawati (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung). *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*. Vol. 3 No 11 Tahun 2021.
- Arief, R., Meidiyustiani, R., & Wulandari, C. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengendalian Internal dan Pengalaman Auditor Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan dengan Implementasi Tata Kelola *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 10865–10876.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4150%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4150/3481>
- Arief, R., Meidiyustiani, R., & Wulandari, C. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengendalian Internal dan Pengalaman Auditor Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan dengan Implementasi Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Properti Komersial di Kota Depok). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10865–10876.
- Arifia, H., Purbady, F. H., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh kualitas pelaporan keuangan, debt maturity, dan free cash flow terhadap efisiensi investasi dengan good corporate governance sebagai variabel moderating. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1150–1160.
- Aswan, N. (2022). 3.3 Tahap–Tahap Penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Azizah, T. D. (2022). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Universitas Internasional Semen Indonesia.
- Budi Septiawan (2018). Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Good Corporate Governance (Survey pada 3 BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). Seminar Nasional Universitas Pamulang. 2018.
- Bevan dan Sharon (2009), riset lapangan atau penelitian di lapangan adalah suatu metode pendidikan yang melibatkan pengumpulan informasi secara langsung melalui observasi, wawancara, pencatatan, dan interaksi langsung.
- Dri Asmawanti, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita dan Indah Oktari Wijayati (2020) Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation* March 20205(1):85-94.
- Dyah Ernawati (2022). Examining Factors Affecting the Accountability of the Performance of Regional Apparatus Organizations. *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(1):77-93.
- Dull, Gelinas, dan Wheeler (2012), tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Edinov, S., Taufik, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., & DP, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel

- Moderasi. *Owner*, 6(4), 3815–3824. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192>
- Evi Nurmilasari (2019). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi - BPPT). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265.
- Fauzi, H. (2022). Pengaruh kompetensi, kepemimpinan yang berwawasan wirausaha dan komitmen kepala desa terhadap tata kelola pemerintahan desa serta dampaknya terhadap kinerja Kepala Desa (Survey di seluruh Desa DI Wilayah Ciayumajakuning). Universitas Pasundan.
- Gea, O. O., & Putra, R. R. (2022). Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2517–2525.
- Hartikayanti, H. N. (2020). Pengaruh kompetensi perangkat desa dan pemahaman aturan keuangan desa terhadap akuntabilitas tata kelola dana desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung).
- Idel Esprianto, Dewi Puspaningtyas Faeny dan Hadita (2023). Factors Affecting The Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP) Local Government in Indonesia. *Accounting and Finance Studies ISSN 2774-4256*.
- Indah Nurul Wulan, Kartika Djati, dan Endraria (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Good Corporate Governance serta Dampaknya pada Kinerja Usaha (Studi Empiris pada BUMD Non Keuangan Kabupaten Tangerang). *Journals of Accounting Science and Technology (JAST)*. Vol. 2 No. 2 (2022).
- Galih Fajar Muttaqin dan Windu Mulyasari (2018). Financial accountability: organizational performance improvement through culture control and contractibility. *Jurnal Akuntansi* August 2018 22(2):210
- Muhammad Hussein dan Sukron Ma'mun (2022). Akuntabilitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan. *JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8(1):173-192.
- Muhammad Ahyarudin dan Rusdi Akbar (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* December 2017 12(2).
- Muhammad Ahyaruddin dan Rusdi Akbar (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* January 2018 19(1).
- Mujannah, Budi Artinah dan Safriansyah (2019). The Effect of Performance Based Budgeting and Internal Control Systems on Performance Accountability of Government Agencies: A Case Study In Banjarbaru City Inspectorates. *Journal of Economic* July 2019 6(3):7-15.
- Riduwan, M. B. A. (2007). Skala pengukuran variabel-variabel penelitian. Alf. Bandung.
- Rio Pratama, Henri Agustin dan Salma Taqwa (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019, Hal 429-444.
- Rizani Mairi, Syamsiar Syamsuddin, Soesilo Zauhar dan Tjahyanulin (2014). Performance Accountability of Local Government (Case study on Presentation of Performance

- Accountability Report and Budget Reports on Office of Management of Regional Revenue, Financial and Assets in Hulu Sungai Selatan Regency). *Public Policy and Administration Research*.
- Rossa Amalia Rizky dan Syntha Noviyana (2022). Effect of e-government and internal control system on performance accountability. *Primanomics Jurnal Ekonomi & Bisnis* 20(3):184-190.
- Rusnadia Wafa, Yesi Mutia Basri, dan Desmiyawati (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau*. P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Salli Edinov, Yesi Mutia Basri, Emrinaldi Nur DP, Taufeni Taufik dan Novita Indrawati (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Governance dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Riset dan Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 4*, Oktober 2022.
- Sirajuddin, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In H. Upu (Ed.), *Pustaka Ramadhan*. Pustaka Ramadhan Bandung.
- Siti Aisyah Sukarno, Jantje J. Tinangon dan Steve Tangkuman (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Indonesia Accounting Journals Vol 2 No 2 Tahun 2020*.
- Siti Nur Azizah dan Muhammad Taufiq Hidayat (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journals of Student Research Vol 1 No. 2 Tahun 2023*.
- Siyoto Sandu, & Sodik Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian (Ayub (ed.); Vol. 1)*. Literasi Media Publishing.
- Sunarto, A. (2021). Pengaruh Komunikasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt. Visionet Data Internasional Cabang Karawaci. *Jurnal Semarak*.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2).
- Teguh Setiawan Wibowo, Taryana, Yayuk Suprihartini, Daniel Tulasi, Amin Harahap dan Didik Suprianto (2023). The Effect Of Accountability, Internal Control System, And Accounting Information System On The Performance Of The Organization In The Financial And Asset Management Agency. *International Journal of Economic Research and financial Accounting (IJERFA) Volume 1, Number 2, January 2023*, Page. 78 – 87.
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (2020). Pengaruh kompetensi aparat pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Weny Nirmalas Sari (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internald Pemerintah (SPIP) dan komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*.

- Widaryati dan Nurul Latifah Pancawardani (2020). Analisis pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Fokus Ekonomi Jurnal Ilmiah Ekonomi* 15(2):477-492.
- Wiwik Andriani, Irda Rosita dan Hidayatul Ihsan (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi dan manajemen* Vol 10 No 2 (2015).
- Wulan, I. N., Djati, K., & Endraria. (2022a). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Good Corporate governance Serta Dampaknya Pada Kinerja Usaha (Studi Empiris Pada BUMD Non Keuangan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology Post Graduate Accounting Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 2(2), 137–156.
- Wulan, I. N., Djati, K., & Endraria, E. (2022b). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Good Corporate governance Serta Dampaknya Pada Kinerja Usaha (Studi Empiris Pada BUMD Non Keuangan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2).
- Yaqin, M. (2021). Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasional sebagai variabel intervening: Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MUI Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yohanis K. Wuarlela, Prihat Assih dan Parawiyati (2022). The Effect of Government Internal Control Systems and Organizational Commitment on Organizational Performance Through Work Accountability as an Intervening Variable (Case Study on the Organization of the Regional Apparatus of the Tanimbar Islands Regency). *Journals of Economics, Finance and Management Studies*. Page No. 2487-2499..